

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu menunjang pembangunan ekonomi. Pengembangan pariwisata merupakan amanat UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Pariwisata dianggap sebagai suatu alternatif di dalam sektor ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan diyakini tidak hanya sekedar mampu untuk menjadi sector andalan dalam usaha meningkatkan devisa negara, namun juga mampu mengentaskan kemiskinan (Yoeti, 2008). Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat local tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun kota masing-masing. Salah satu strategi yang tumbuh subur dan menjadi stakeholder dalam pengembangan desa wisata (Atmoko et al., 2014).

Menurut Zakaria & Suprihardjo, (2014) desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di desa tersebut, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa

wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Keberadaan desa wisata di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut dilihat dari tahun 2009 yang hanya tercatat 144 desa wisata menjadi 980 desa wisata di tahun 2013 (Kementerian Pariwisata, 2014).

Kriteria suatu desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata, apabila memiliki beberapa faktor-faktor pendukung antara lain; (1) Memiliki potensi produk dan daya tarik, (2) memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM), (3) motivasi kuat dari masyarakat, (4) memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai, (5) mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata, (6) mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, dan (7) ketersediaan lahan/area yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. Mengacu pada kriteria pengembangan desa wisata di atas, maka Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata.

Desa Kertagena Daya memiliki desa wisata yang diberi nama Bukit Kehi. Berasal dari bahasa daerah setempat yakni Tanah *Ihee* yang artinya tanah tidak bertuan atau lahan yang tidak ada hak milik perseorangan maupun lembaga. Namun lambat laun masyarakat menyebutnya Tanah *Ihee* / Bukit *Ihee* menjadi Bukit Kehi karena bertepatan dengan pembukaan tempat wisata tersebut. Dengan luas lahan sekitar 8 hektare yang mayoritas tanahnya bebatuan, Bukit Kehi menawarkan keindahan alam yang asri. Disamping itu, fasilitas yang terdapat di desa wisata seperti kolam renang, spot foto, gazebo dan fasilitas lainnya menambah daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung di desa Kertagena Daya.

Hal tersebut dibuktikan pada gambar 1.1 yang merupakan hasil dokumentasi dari penulis ketika melakukan observasi.



**Gambar 1.1 Dokumentasi Desa Wisata Bukit Kehi**

Pembangunan destinasi wisata desa Bukit Kehi berawal dari Kepala Desa ketika melakukan *Study Banding* di desa Pujon Kidul dan Coban Rais. Kegiatan tersebut telah memberikan Kepala Desa inspirasi untuk memanfaatkan Bukit Kehi menjadi destinasi desa wisata. Menurut Kepala Desa tujuan dari pembangunan Bukit Kehi sebagai wisata desa tidak terlepas dari pemuda desa yang sulit untuk mencari pekerjaan, maka Kepala Desa beserta perangkat desa berinisiasi bahwa pembangunan Bukit Kehi dapat membuka lapangan pekerjaan yang diperuntukan bagi masyarakat desa Kertagena Daya. Secara tidak langsung pengelolaan destinasi pariwisata di desa Kertagena Daya akan membawa dampak ekonomi serta kesejahteraan hidup dalam jangka panjang kepada masyarakat. Dengan dikelolanya destinasi pariwisata akan mendorong tumbuhnya usaha kreatif serta peningkatan infrastruktur lokal guna menunjang kegiatan kepariwisataan tersebut.

Pokdarwis merupakan pengelola yang bertanggung jawab dalam desa wisata Bukit Kehi. Anggota pokdarwis terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan

daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Triambodo, 2014). Desa wisata Bukit Kehi juga tidak terlepas dari peran Pokdarwis yang mayoritas dari pemuda desa Kartagena Daya. Pokdarwis juga ikut andil dalam pembentukan kios makanan, minuman, kebersihan dan keamanan yang terdapat di desa wisata. Disamping sebagai pengelola fisik Pokdarwis juga bertugas untuk mengelola manajerial atau kelembagaan yang ada pada desa wisata.

Pengelolaan desa wisata Bukit Kehi pada tahun 2019 hingga 2020 dikelola oleh Pokdarwis yang hanya memiliki sarana prasarana yang terbatas serta manajerial yang kurang optimal dikarenakan ketua Pokdarwis sebagai *leader* pengelola desa wisata yang terkendala kesibukan pribadi. Tetapi dengan berjalannya waktu dan atas kebijakan oleh Kepala Desa destinasi wisata Bukit Kehi kelola oleh BUMDes setempat. Tujuannya yakni melanjutkan pengelolaan desa wisata Bukit Kehi dan mengorganisir 15 pemuda desa yang tergabung dalam anggota pokdarwis. BUMDes memiliki diberikan peran dalam mengembangkan wisatanya dilakukan dengan cara sendiri yang berasal dari kekuatan desa itu sendiri dengan semua potensi yang tersedia dan aktif dalam mengajak dan mendorong masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola wisata dengan bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah melalui dana desa. Desa wisata Bukit Kehi ini secara resmi dibuka pada tahun 2019 namun baru berkembang dalam satu tahun terakhir tepatnya bulan Juni 2021 setelah pengelolaan diserahkan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah (Diartho, 2017). Artinya melalui pengembangan dari desa wisata

merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai peningkatan kesejahteraan sosial dan komersial. Dalam unit usaha bersama yang dijalankan oleh BUMDes salah satunya dapat dilakukan dengan pembuatan dan pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi-potensi dan sumber daya desa. Pemanfaatan sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu peluang dalam upaya pembangunan desa. Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata BUMDes dituntut untuk memiliki strategi atau upaya upaya sebagai jalan pengembangan pariwisata. Sehingga dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan pemasukan Anggaran Pendapatan Desa (APDes).

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Prasetyo, 2017). Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tercetus juga pada Desa Kertagena Daya pengembangan usaha masyarakat yang dikelola oleh BUMDes setempat.



**Gambar 1.2 Dokumentasi Unit Usaha BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu indikator nyata dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat UUD 1945. Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUMDes. Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya mengedepankan partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi perekonomian, sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah namun masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya. BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes di Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kemampuan melalui mobilisasi sumberdaya alam dan potensi desa lainnya.

Kemandirian desa dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdapat di desa tersebut. Bentuk kemandirian desa terwujud dari meningkatnya perekonomian desa melalui usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Usaha yang dijalankan oleh masyarakat tentunya memiliki legalitas sehingga masyarakat tidak khawatir dengan pengelolaan manajerial. Badan Usaha Milik Desa menjadi wadah masyarakat dalam pelaksanaan operasionalisasi bagi setiap unit usaha masyarakat desa khususnya desa Kertagena Daya. Badan Usaha Milik Desa Kertagena Daya memiliki berbagai unit yang dikelola oleh masyarakat desa dengan berbagai jenis usaha, yakni pengolahan gula aren, siwalan atau *taal*, legen (air nira yang keluar dari pohon siwalan), penyewaan terop serta rias pengantin. Berbagai unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa Kertagena Daya terdapat pula unit usaha desa wisata yang dikelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Menurut penelitian Yulistiyono (2021) Pokdarwis sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari potensi desa, mengemban tugas dan tanggung dikarenan harus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah persaingan antar desa wisata bahkan lebih di masa depan.

BUMDes bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat dengan stakeholder bisa saling bekerja untuk saling bersinergi dalam pembangunan desa. Sehingga desa bisa mandiri dalam meningkatkan mutu sumber daya alam, meningkatkan dunia usaha atau bisnis sesuai dengan potensi desa. Salah satu bentuk peran dalam percepatan pembangunan dan kemandirian desa yakni dengan meningkatkan mutu kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa serta lembaga desa terkait. Artinya kapasitas menjadi hal yang sangat penting

karena menyangkut kemampuan lembaga dalam sistem untuk menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan efektif sehingga organisasi atau lembaga tersebut dapat menjalankan peranannya secara optimal. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa (Nugrahaningsih & Muttaqin, 2018). Ukuran indikasi dalam keberhasilan dari optimalisasi peran yang dilakukan oleh BUMDes yang mengembangkan potensi desa wisata pada dasarnya tetap bergantung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam mengatur pola kelembagaan desa tersebut. Jika dalam partisipasi dan keterlibatan dari pemerintah desa dan masyarakat tinggi maka kemungkinan besar kesuksesan dalam pengoptimalisasian dalam pengembangan desa wisata akan lebih baik dan cepat.

Menurut Puspayanthi et al., (2017) dengan peran BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa maka dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan taraf kehidupannya terutama dalam segi ekonomi sehingga ketika BUMDes telah mampu berperan secara optimal pada desa maka desa akan mampu menjadi desa yang mandiri. Melalui unit usaha yang dikelola oleh BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dengan berbagai upaya dan pola optimalisasi peran BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, terwujud dari adanya BUMDes masyarakat desa telah mampu mengembangkan usaha-usaha kecil yang membantu perekonomian masyarakat desa. Terdapat berbagai desa yang bisa tumbuh dan maju dengan pengoptimalisasian Badan Usaha Milik Desa contohnya Desa Pujon Kidul melalui unit usaha desa wisata, desa Ponggok di Kabupaten Klaten yang menjadi contoh desa dengan tata kelola keuangan yang baik. Maka melalui peran BUMDes sebagai salah satu lembaga

ekonomi di desa maka akan dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan taraf kehidupannya terutama dalam segi ekonomi dan sosial.

Tujuan awal peran BUMDes dalam mengelola desa wisata yaitu untuk mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan guna mendorong laju perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, serta untuk mendorong sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Bumdes didirikan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian dari Nurhayati (2018) pembangunan pariwisata yang dilakukan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dampak tersebut berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak yang terjadi akibat pembangunan pariwisata pada aspek ekonomi diantaranya yaitu terbukanya lapangan kerja baru, berkurangnya tingkat pengangguran, pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat, membantu menanggung beban pembangunan sarana prasarana infrastruktur setempat, pada aspek sosial budaya diantaranya, perlindungan dan pelestarian budaya serta adat-istiadat, meningkatkan tingkat pendidikan serta meningkatnya keterampilan.

Potensi wisata Desa Kertagena Daya tidak lepas dari nilai sosial, budaya, serta keindahan panorama alamnya. Potensi tersebut sangat strategis dan potensial untuk dikelola dalam kegiatan wisata maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa sektor pariwisata memiliki harapan yang sangat menjanjikan. Mengingat desa wisata Bukit Kahi yang memiliki potensi menarik itu. Kurangnya maksimal perencanaan sebuah pembangunan pariwisata salah satunya adalah kurang profesionalitas manajerial sebagai pengelola dan penanggungjawab serta minimnya keterlibatan masyarakat. Menurut Undang-

undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa suatu Badan Usaha dapat dipahami sebagai BUMDes dapat menumbuhkan atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagi obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata di daerah tempat tinggalnya. Keberhasilan pembangunan pariwisata yaitu dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah pengunjung wisata Bukit Keki pada tahun 2020-2021.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Bukit Keki 2021

| NO | BULAN     | TAHUN | JUMLAH PENGUNJUNG |
|----|-----------|-------|-------------------|
| 1  | Januari   | 2020  | 1.984             |
| 2  | Februari  | 2020  | 1.537             |
| 3  | Maret     | 2020  | 837               |
| 4  | April     | 2020  | 1.489             |
| 5  | Mei       | 2020  | 865               |
| 6  | Juni      | 2020  | 643               |
| 7  | Juli      | 2020  | 1.321             |
| 8  | Agustus   | 2020  | 1.134             |
| 9  | September | 2020  | 864               |
| 10 | Oktober   | 2020  | 1.275             |
| 11 | November  | 2020  | 1.225             |
| 12 | Desember  | 2020  | 921               |
| 13 | Januari   | 2021  | 1.381             |
| 14 | Februari  | 2021  | 1.929             |
| 15 | Maret     | 2021  | 1.287             |
| 16 | April     | 2021  | 1.432             |
| 17 | Mei       | 2021  | 1.054             |
| 18 | Juni      | 2021  | 1.935             |
| 19 | Juli      | 2021  | 674               |
| 20 | Agustus   | 2021  | 1.206             |
| 21 | September | 2021  | 1.019             |
| 22 | Oktober   | 2021  | 1.643             |
| 23 | November  | 2021  | 1.140             |
| 24 | Desember  | 2021  | 1.356             |

Sumber : Bendahara BUMDes Melati

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan obyek Wisata Bukit Kehi Desa Kertaaagena Daaya mengalami naik turun, hal ini menunjukkan obyek Wisata Bukit Kehi belum mampu memberikan kemajuan yang signifikan dalam mengoptimalkan potensi yang ada, hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti sarana dan prasarana pendukung dan kurangnya partisipasi Sumber Daya Manusia yang mengelola desa wiata tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam mengelola desa wisata Bukit Kehi selaras dengan tujuan peneliti dalam menentukan konsep bahwasanya peran BUMDes dalam mengelola desa wisata Bukit Kehi perlu melibatkan seluruh potensi desa dan partisipasi masyarakat desa Kertagena Daya. Suatu obyek wisata dapat terus mengalami peningkatan apabila sumberdaya yang dimiliki dapat dikembangkan dengan baik, khususnya Bukit Kehi, dari semua potensi yang dimiliki belum dioptimalkan, serta kondisi riil objek wisata Bukit Kehi yang harus dibenahi dalam pengelolaannya, maka dibutuhkan peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata guna menjadikan Bukit Kehi berkembang pesat dan diminati banyak pengunjung, serta mampu memberikan pengaruh dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kertagena Daya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan meneliti terkait peran BUMDes melalui unit usaha desa wisata Bukit Kehi. Dengan judul skripsi **“Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Unit Usaha Desa Wisata Bukit Kehi Sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah tentang:

1. Bagaimana peran BUMDes melalui unit usaha Desa Wisata Bukit sebagai pengembangan ekonomi masyarakat desa Kertagena Daya?
2. Bagaimana dampak adanya peran BUMDes melalui unit usaha desa wisata Bukit Kehi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kertagena Daya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran BUMDes melalui unit usaha desa wisata Bukit Kehi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat di desa Kertagena Daya.
2. Menganalisis dampak dari adanya peran BUMDes melalui unit usaha Desa Wisata Bukit Kehi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat di desa Kertagena Daya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat hasil penelitian untuk perkembangan Ilmu Ekonomi diantaranya yakni Pembangunan Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan peran BUMDes melalui unit usaha desa wisata Bukit Kehi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat di desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang berimplementasi pada BUMDes di berbagai desa. Kebijakan tersebut akan melahirkan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan dapat mengembangkan pembangunan desa.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan mahasiswa lainnya khususnya guna referensi dalam pembuatan jurnal ataupun skripsi yang berkaitan dengan Peran BUMDes melalui unit usaha.

c. Bagi Masyarakat

Membeikan informasi kepada masyarakat terhadap peranan BUMDes melalui unit usaha desa wisata sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.